PEMERINTAH KABUPATEN

BARITO UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP) TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Pendreh Km. 1 Telp (0519) 21704
https://dispupr.baritoutarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2104 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dalam penyusunan laporan ini. Dengan laporan kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara pada tahun-tahun selanjutnya.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Muara Teweh, Januari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Utara,

MUHAMMAD IMAN TOPIK, SIP., M. Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700923 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Gambaran Umum Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara 1

C. Isu Strategis 7

II. PERENCANAAN KINERJA 9

A. Rencana Startegis 9

B. Perjanjian Kinerja 12

III. AKUNTABILITAS KINERJA 16

A. Capaian Kinerja Organisasi 16

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 17
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2022 dan 2023 30
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka menangah . 31
4. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran 32
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang Diberikan 33
6. Analisis atau Efesiensi Pengguanaan Sumber Daya 34
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunnjang Keberhasilan Pencapian Pernyataan Kinerja 35

B. REALISASI ANGGARAN 36

IV. PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang meyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Barito sedangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berkewajiban setiap tahun untuk meyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja yang mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

1. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara hakekatnya adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tertentu dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang berdasarkan kewenangan daerah, tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, meliputi bidang Administrasi, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Kota, Tata Ruang, dan Jasa Konstruksi

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menpunyai fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan serta pemberian perizinan dibidang pekerjaan umum, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
b) Pengelolaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas hak milik pemerintah daerah dan negara yang menjadi tanggungjawabnya.
c) Pelaksanaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknik di bidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
d) Pengendalian teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan kebijakan umum Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
e) Pengelolaan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Barito Utara. Dalam arti menyelenngarakan fungsi preservasi jalan dan jembatan, sarana permukiman, saluran sekunder irigasi dan pemeliharaan taman.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 52 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, maka susunan organisasi terdiri dari:

a. Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Dinas berdasarkan peraturan perundangan-undangang yang berlaku.
b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata leksana kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan dan administratif terhadap tugas bidang secara terpadu. Sekretariat terdiri dari :
   (1) Subbag. Tata usaha, data dan informasi publik yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata usaha, data dan informasi publik yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
   (2) Subbag. Perencanaan dan Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
c. Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan teknis, survey, pengawasan, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembangunan, peningkatan/ penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

d. Bidang Cipta Karya yang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang cipta karya yang meliputi melaksanakan pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan merumuskan kebijakan teknis serta menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang cipta karya.

e. Bidang Sumber Daya Air yang dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan pengairan, operasi dan pemeliharaan, penambangan bahan galian golongan C dan pengamanan pemanfaatan air permukaan.

f. Bidang Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata ruang, kegiatan penyusunan, perencanaan dan pengawasan serta pemanfaatan tata ruang kabupaten.

g. Bidang Tata Kota dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan kota, bangunan, pertamanan, kebersihan dan keindahan kota.

h. Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dab mengendalikan pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi.

i. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dari pegawai ASN sesuai dengan bidang keahlian dan kerampilan.

j. Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara. Balai Pengelolaan Perbekalan dan Peralatan (ALKAL) dipimpin oleh Kepala Balai yang mempunyai tugas untuk pengelolaan Peralatan Laboratorium, Alat-alat Berat dan membantu tupoksi kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada gambar berikut :

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

C. Isu Strategis

Isu Strategis yang menjadi fokus perhatian dan menjadi arah kebijakan utama dalam permasalahan pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang meliputi :

1. **Jalan dan Jembatan untuk akses transportasi ke seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara;**

   Sesuai degan Visi, Misi dan prioritas program Bupati Barito Utara terpilih, pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan merupakan salah satu prioritas utama program yang harus dipenuhi. Hal ini memang sangat beralasan karena menjadi faktor pendukung utama dalam menunjang kelancaran arus tranportasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Namun yang menjadi tantangan bahkan masalah adalah cakupan wilayah yang luas dengan tingkat sebaran permukiamn penduduk yang cukup sulit terjangkau serta masih terbatasnya anggaran yang tersedia.

2. **Sanitasi Perkotaan dan peningkatan sarana prasarana permukiman;**

   Sanitasi perkotaan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi dan tingkat perekonomian serta tingkat pendidikan yang rata-rata masih kelas menengah dan bawah menjadikan aspek sanitasi masih kurang mendapat perhatian masyarakat, sehingga masih perlu penanganan yang cukup intensif dari pemerintah daerah khususnya melaui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

3. **Pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau;**

   Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan menjadi perhatian penting karena menyangkut ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui kesembingan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman,segar, indah dan bersih.

4. **Peningkatan dan pengelolaan Drainase;**

   UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan PP No. 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan dalam program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dalam konsep drainase berwawasan lingkungan, hal ini mengingat pengelolan drainase juga menyangkut banyak aspek dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat.

5. **Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten.**

   PerMen PU No.16/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang Undang No. 26 Tahun 2007 pasal 11 (ayat 2) tentang Penataan Ruang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan amanat yang menjadi vital peranannya dalam berbagai aspek sehingga perlu dijabarkan walaupun dalam kompleksitas masalah yang cukup tinggi dalam pelaksanaannya ditingkat lapangan selama ini karena menyangkut berbagai kepentingan orang per orang, kelompok bahkan korporasi.

6. **Pengembangan Daerah Irigasi untuk menunjang petani pemakai air dalam mencapai swasembada pangan.**

   Pengembangan Daerah Irigasi untuk menunjang petani pemakai air dalam mencapai swasembada pangan guna mewujudkan ketahanan pangan menjadi isu strategis ketika dihubungkan dengan kenaikan jumlah penduduk dan tingginya laju konversi lahan beririgasi menjadi daerah pemukiman/industri. Peningkatan produksi padi Kabupaten Berito Utara menjadi salah satu kunci pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Pemetaan zonasi potensi pengembangan lahan irigasi telah dilakukan namun untuk menentukan kebijakan pengembangan lahan diperlukan terhadap kenaikan produksi dan investasi biaya guna mengetahui efektifitas pengembangannya. Pengembangan daerah irigasi ini dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi beras nasional melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi diperlukan untuk meningkatkan produksi tersebut.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara tahun 2024 ini disusun disamping mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara. RPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara 2024-2026. Perubahan tersebut dilakukan untuk penyesuaian pada indikator dan pergeseran anggaran, capaian sasaran, arah kebijakan dan strategis pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan rasional dan prioritas pembangunan saat ini.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan Stakeholder.

Perumusan Visi dan Misi RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 didasarkan pada isu-isu strategis daerah. Penekanan pada tiga tahun adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas; membangun infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informasi antar wilayah; memperkuat perimbangan dan daya saing perekonomian daerah; mewujudkan Kabupaten Barito Utara sejahtera dan lestari serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

maka dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi misi jangka menengah tiga tahun Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Visi Pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai *(desired future)* dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024 – 2026 dengan visi “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Rensponsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”., ditetapkan Misi Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024, yaitu:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan rensponsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaran jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Infrastruktur dan Penataan Ruang yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu "**Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi**" serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara terkait pada pencapaian tujuan ke-1 yaitu "**Meningakatnya konektivitas antar wilayah"** serta pencapaian sasaran ke-1 yaitu "**Meningkatnya desa yang terhubung dengan pusat wilayah".**

1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pada hakekatnya adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dimana tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Selanjutnya Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan.

Sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara maka dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya koneksivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik

Berkembangnya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Meningkatnya pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih
	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik
		Persentase rumah tinggal bersanitasi
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang wajib dilakukan oleh pimpinan instansi disetiap lini/level di lingkungan kerjanya karena merupakan sarana tanggung jawab yang diberikan sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat terarah sesuai target. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh isntansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharpakan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja) PD Tahun 2024, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	58,00 %
	Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	96,73 %
Meningkat nya kualitas sumber daya air dan irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	71,30 %
Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih	67,54 %
Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	81,20 %
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	81,18 %
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	100 %

Sedangkan untuk rencana penganggaran untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja akan disampaikan pada tabel Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara tahun 2024.

- Sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan dan jembatan dimana terbagi menjadi 2 indikator sasaran yaitu : Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam) dengan target 53,13 % dan Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik dengan target 94,70 %.
- Sasaran strategis meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi dengan indikator presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 66,30 %.
- Sasaran strategis meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih dengan target persentase rumah tangga berakses air bersih sebesar 56,92 %.

- Sasaran strategis Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman dengan target indikator Persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 77,92 % dan Persentase rumah tinggal bersanitasi 75 %.
- Sasaran strategis meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan target indikator persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW 100 %

Program		Anggaran	Keterangan
1. **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota			
Pembangunan Jalan	Rp.	132.421.379.948,-	
Pembangunan Jembatan	Rp.	328.934.858.144,-	
2. **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp.	1.500.000.000,-	
3. **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Rp.	2.889.190.000,-	
4. **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat			
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Rp.	9.264.717.500,-	
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Pengolahan Setempat	Rp.	1.423.854.500,-	
5. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Rp.	1.328.000.000,-	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari penetapan kinerja tahun 2024 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan dan perubahan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab II, siklus kinerja dimulai dari perencanaan strategis, meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam penetapan kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan organisasi, dan untuk ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku, dimana setiap organisasi birokrasi atau perangkat daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan program / kegiatan. Oleh sebab itu disini nantinya akan disajikan tentang gambaran ringkas tentang capaian perjanjian kinerja tahun 2024 yang selanjutnya sebagai instrumen verifikasinya akan dilakukan analisis dengan membandingkan capaian kinerja tahun-tahun

sebelumnya. Adapun perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1.

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel. 3.1 Realisasi Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	• Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	58,00%	58,25 %	100,43
		• Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	96,73 %	102,60 %	106,07
2.	Meningkat nya kualitas sumber daya air, dan irigasi	• Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	71,30 %	65,19%	91,43
3.	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	• Persentase rumah tangga berakses air bersih	67,54 %	60,57 %	89,68
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	• Persentase drainase dalam kondisi baik	81,20 %	97,50%	120,07
		• Persentase rumah tinggal bersanitasi	81,18 %	75,80 %	93,37
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	• Ketataan Terhadap RTRW	100 %	100 %	100
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA TAHUN 2024					**97,10**

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja melalui rumusan sebagai berikut adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas jalan dan Jembatan				
Indikator Kinerja	**Target 2024**	**Realisasi 2024**	**Capaian (%) 2024**	**Realisasi 2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	58,00 %	58,25 %	100,43 %	38,99 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran pertama yaitu “Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)

Rumus/perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi 2023 + 2024 + PJKB}}{\text{Panjang Jalan Seluruhnya}} \text{ X 100 \%}$$

$$\frac{\text{56,23 + 19458,1 + 365,82}}{\text{758,14 KM}} \text{ X 100 \%}$$

= 58,25 %

Target 58,00 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 sebesar **58,25 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program penyelenggaraan jalan dengan kegiatan pembangunan jalan hal ini disebabkan karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan sebagai langkah mempertahankan daya dukung jalan yang didukung dengan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan kegiatan pemeliharaan rutin jalan. Adapun hasil capaian di tahun 2024 di dapat dari tipe pekerjaan pengaspalan dan rigid dimana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Paket Pekerjaan Jalan Tahun 2024

No.	Paket	Panjang (m)	Jenis Konstruksi
1	Karya Bhakti TNI Peningkatan Jalan Sp. Thamrin - Sp. Jamut	3500	Asphalt HRS-WC
2	Pembangunan Jalan dari Gerbang BBI Trinsing Jalan di atas Bendung	34109	Rigid Pavement
3	Peningkatan Jalan Batu Raya I	352	Rigid Pavement
4	Pengaspalan Jalan Jingah (Pinggir Sungai Perkampungan Jingah)	5655	Asphalt
5	Peningkatan Jalan Batu Raya I - Batu Raya II (Trans 57)	510	Rigid Pavement
6	Peningkatan Jalan Batu Raya II (Trans 59)-Batu Raya I Simpang Masjid)	470	Rigid Pavement
8	Peningkatan Jalan dari Desa Nihan Hilir (Wagak/Tambau) menuju jalan Poros Lahei - Benao	1915	Rigid Pavement
9	Peningkatan Jalan Desa Batu Raya 2	155	Rigid Pavement

No.	Paket	Panjang (m)	Jenis Konstruksi
10	Peningkatan Jalan Desa Sikan Menuju Jembatan Sikan - Tumpung Laung	665	Rigid Pavement
11	Peningkatan Jalan Login Dotot TMMD (Lanjutan)	150	Rigid Pavement
12	Peningkatan Jalan Hj.Sri Hidayati di Desa Malawaken	65	Rigid Pavement
13	Peningkatan Jalan ke arah Desa Pangkuh	177	Rigid Pavement
14	Peningkatan Jalan KM. 53 - KM. 54	595	Rigid Pavement
15	Peningkatan Jalan KM 54 - KM. 55	200	Rigid Pavement
16	Peningkatan Jalan Lahei I Menuju Simp. Lahei-Luwe	205	Rigid Pavement
17	Peningkatan Jalan Lahei -Luwe	350	Rigid Pavement
18	Peningkatan Jalan Manggala - Jl. Negara Km. 2	144,33	Rigid Pavement
19	Peningkatan Jalan Margo Rukun 2	94	Rigid Pavement
20	Peningkatan Jalan Margo Rukun 4	127	Rigid Pavement
22	Peningkatan Jalan Menuju Desa Liang Buah	230	Rigid Pavement
23	Peningkatan Jalan menuju Desa Liang Naga	268,22	Rigid Pavement
24	Peningkatan Jalan Menuju Jantur Doyan	968,55	Rigid Pavement
25	Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Keramat	542,59	Rigid Pavement
26	Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Keramat Mangkomot Desa Benangin (Lanjutan)	171	Rigid Pavement
27	Peningkatan Jalan Menuju Pondok Pesantren Darussalam Al-Mubarokah Desa Jingah (Lanjutan)	142,77	Rigid Pavement
28	Peningkatan Jalan Munardi Kelurahan Tumpung Laung II	541	Rigid Pavement
29	Peningkatan Jalan Negara Benangin Lampeong - Sampirang II	37,64	Rigid Pavement
30	Peningkatan Jalan Negara Km. 21 - Nihan	415,5	Rigid Pavement
31	Peningkatan Jalan Negara KM. 38 - Lokasi Trans 38	401,5	Rigid Pavement
32	Peningkatan Jalan Negara KM. 52 - Simp. Trans 38	330,71	Rigid Pavement
33	Peningkatan Jalan Negara Muara Teweh Benangin Km. 40 - Desa Panaen	151	Rigid Pavement
34	Peningkatan Jalan Pendreh Menuju Desa Pararawen	410	Rigid Pavement
35	Peningkatan Jalan Simpang Thamrin - Trans Liju	381	Rigid Pavement
36	Peningkatan Jl. Trans Liju - Benangin V	150,45	Rigid Pavement

Sumber : Bidang Bina Marga DPUPR Kab.Barut, 2024

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Adanya kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik, tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pemborорng

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2024

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas jalan dan Jembatan				
Indikator Kinerja	**Target 2024**	**Realisasi 2024**	**Capaian (%) 2024**	**Realisasi 2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	58,00 %	58,25 %	100,43	84,61 %

b. Indikator kinerja 2 : Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik

Rumus/perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi 2023 + 2024 + PJKB}}{\text{Panjang Jembatan Seluruhnya}} \text{ X 100 \%}$$

$$\frac{444 + 63{,}35 + 4174{,}26}{4582{,}30} \text{ X 100 \%}$$

= 102,60 %

Target 96,73 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 sebesar **102,60 %.** Untuk memenuhi target tersebut melalui program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota, sub kegiatan Pembangunan Jembatan**.** Pada indikator ini ada beberapa paket pekerjaan yang mendukung realisasinya indikator dan pada kegaiatan rehabilitasi jembatan yang mana kegiatan tersebut pun sebagai langkah mempertahankan kualitas jembatan dalam kondisi baik. Paket pekerjaan rehabilitasi jembatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. Capaian Paket Pekerjaan Jembatan Tahun 2024

No.	Paket Kegiatan	Panjang Jembatan (m')	Lebar	KETERANGAN
1	Pembangunana Jembatan Ruas Jalan Kandui – Tongka Sebanyak Laon Udong	18,35	6	
2	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Kandui – Tongka Sei Jaman Kecil (Lanjutan)	6,6	6	
3	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Tongka – Batu Raya (Lanjutan)	12,6		

No.	Paket Kegiatan	Panjang Jembatan (m')	Lebar	KETERANGAN
4	Pembangunan Jembatan di Desa Sikui Km. 27	25,8		

Sumber : Bidang Bina Marga DPUPR Kab.Barut, 2024

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pembororng

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2024

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi				
Indikator Kinerja	**Target 2024**	**Realisasi 2024**	**Capaian (%) 2024**	**Realisasi 2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	71,30 %	65,19 %	91,43	62,77 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kedua yaitu "Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi" dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 2 : Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Rumus/perhitungan ***:***

$$\frac{\text{Realisasi 2023 + 2024 + LIKB}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten (LIK)}} \text{ X 100 \%}$$

$$\frac{\text{21,5 + 280 + 4748 Ha}}{\text{7745 Ha}} \text{ X 100 \%}$$

= 65,19 %

Target 71,30 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 sebesar **65,19 %** untuk memenuhi target tersebut melalui progravm Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi. Keberhasilan dalam mencapai indikator tersebut didukung oleh beberapa kegiatan yang saling melengkapi yait u :

- Mengalokasikan dana Operasi dan Pemeliharaan yang cukup berdasarkan tingkat kerusakan jaringan bangunan irigasi.
- Upaya merehabilitasi jaringan irigasi untuk mensuplai kebutuhan air yang semakin bertambah.
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas yang menangani operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Adapun hasil capaian di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut :

Tabel 3.5. Capaian Paket Pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Tahun 2024

No	Paket Pekerjaan	Luas
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Majangkan (DAK Penugasan 2024)	46 Ha
2	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Montallat	25 Ha
3	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I.R Pepas	28 Ha
4	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I.R Sikan	26 Ha
5	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I.R Tumpung Laung	27 Ha
6	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Tandrahean	37 Ha
7	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Trinsing	35 Ha
8	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Walur	28 Ha
9	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Bawang	28 Ha
TOTAL		**280 Ha**

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pemborong

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2024

- Meningkatkan kinerja SDM

- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 3 : Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih				
Indikator Kinerja	**Target 2024**	**Realisasi 2024**	**Capaian (%) 2024**	**Realisasi 2024**
1. Persentase rumah tangga berakses air bersih	67,54 %	60,57 %	89,68	52,33 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase rumah tangga berakses air bersih

Rumus/perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi 2023 + 2024 + PBAM}}{\text{Jumlah Penduduk}} \text{ X 100 \%}$$

$$\frac{\text{885 + 300 + 18,431}}{\text{32381}} \text{ X 100 \%}$$

= 60,57 %

Terget 67,54 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 sebesar **60,57 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kegiatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.

Adapun hasil capaian di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.6

Tabel 3.6. Capaian Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2024

NO	PEKERJAAN	SR
1	Pembuatan DAM 825 M2 di Induk Sei Pararawen (air bersih)	20
2	Pembuatan Sumur Bor di Ds. Rimba Sari	20
3	Pembuatan Sumur Bor di Ds. Sei Rahayu I	20
4	Pembuatan Sumur Bor di Ds. Sei Rahayu II	20
5	Pembuatan Sumur Bor di RT. 01 Desa Rimba Sari (KM. 53)	20
6	Pembuatan Sumur Bor di RT. 05 Desa Sei Rahayu 2 (KM. 52)	20
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Perdesaan di Desa Pandran Raya	20
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Perdesaan di Desa Pendreh	20
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Perdesaan di Ds. Bayas Kel. Lanjas	20
10	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih di Desa Batu Raya II	20
11	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih di Desa Hurung Enep (Lajutan)	20
12	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih di Desa Ketapang	20
13	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih di Desa Lawarang (Lanjutan)	20
14	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih di Desa Nihan Hulu	20
15	Peningkatan Sistem Prasarana Air Bersih di Kel. Jingah Komplek Sosial (Lanjutan)	20

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

- Kebutuhan Air bersih sangat diperlukan untuk masyarakat.
- Bahan baku air minum masih sangat berlimpah dengan teknologi pengolahan yang semakin tepat sasaran dan tepat guna.
- Tersedianya anggaran yang mendukung kegiatan tersebut.
- Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pemborong

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2024

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman				
Indikator Kinerja	**Target 2024**	**Realisasi 2024**	**Capaian (%) 2024**	**Realisasi 2024**
1. Persentase drainase dalam kondisi baik	81,20 %	97,50 %	120,07	112,89 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran keempat yaitu “Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman” dapat dilihat indikator kinerjanya 1 sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase drainase dalam kondisi baik

Rumus/perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi 2023 + 2024 + PJ (m)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten}} \text{ X 100 \%}$$

$$\frac{\text{5128,2 m + 2685,84 + 7973 m}}{\text{13711 m}} \text{ X 100 \%}$$

= 97,50 %

Target 81,20 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 sebesar **97,50 %.** Untuk memenuhi target tersebut melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah dengan Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman. Adapun hasil capaian di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Capaian Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Tahun 2024.

NO	PEKERJAAN	OUTPUT
1	PARIT BELAKANG MESJID MITAHUL JANNAH LEMO II	25,00
2	PARIT DEPAN DEPAN BUSTANUS ULUM LEMO II	25,00
3	PARIT JALAN PERMATA	127,00
4	PARIT JALAN PERSEMAIAN	143,20
5	PEMBUATAN DRAINASE DEPAN KANTOR DESA BATURAYA II	117,00
6	PEMBUATAN SALURAN LIMBAH DESA KANDUI	214,00
7	PEMBUATAN SALURAN LIMBAH Gg. RONGGOLAWE	141,85

8	PEMBUATAN SALURAN LIMBAH JALAN PERTIWI II UJUNG RT. 28 (LANJUTAN)	66,40
9	PEMBUATAN SALURAN LIMBAH JL. AI MUSTAQIM TAMAN REKREASI REMAJA	17,40
10	PEMBUATAN SALURAN LIMBAH JL.BANGAU Gg. WALET (LANJUTAN)	68,27
11	PEMBUATAN SALURAN LIMBAH JL. IMAM BONJOL	164,00
12	PEMBUATAN SALURAN LIMBAH JL. PARARAWEN	176,00
13	PEMBUATAN SALURAN LIMBAH JL. PERMATA	218,00
14	PEMBUATAN SALURAN LIMBAH JL. SEMOGA INDAH	130,70
15	PEMBUATAN SALURAN LIMBAH JL. WIRA PRAJA III	104,60
16	PEMBUATAN SALURAN LIMBAH JL. WIRA PRAJA IV	280,30
17	PEMBUATAN SALURAN LIMBAH LINGKUNGAN JL. KELADAN RT. 04	69,50
18	PEMBUATAN SALURAN LINGKUNGAN KELURAHAN LANJAS JL. PERSEMAIAN RT. 32	129,30
19	PEMBUATAN SALURAN LIMBAH PANTI AJAR I RT. 28 KEL. LANJAS	101,85
TOTAL		**5.128,2**

Faktor Penghambat :

- Kelalaian penduduk dalam menjaga lingkungan dimana membuang sampah disaluran drainase.
- Belum semua masyarakat Kabupaten Barito Utara menyadari pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi.
- Adanya infrastruktur yang lain dimana bangunan semi permanen di atas saluran drainase yang mengakibatkan terganggunya mekanisme kerja saluran drainase.

Faktor Pendorong :

- Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ konsultan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2024

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman				
Indikator Kinerja	**Target 2024**	**Realisasi 2024**	**Capaian (%) 2024**	**Realisasi 2023**
2. Persentase rumah tinggal bersanitasi	81,18 %	75,80 %	93,70	52,81 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran keempat yaitu “Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman” dapat dilihat indikator kinerjanya 2 sebagai berikut :

b. Indikator kinerja 2 : Persentase rumah tinggal bersanitasi.

Rumus/perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi 2023 + 2024 + JRS}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \text{ X 100 \%}$$

$$\frac{\text{90 KK + 171+ 24286 RT}}{\text{32381 RT}} \text{ X 100 \%}$$

= 75,80 %

Target 81,18 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 sebesar **75,80 %** untuk memenuhi target tersebut melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman. Adapun hasil cap
aian di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8. Capaian Paket Pekerjaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tahun 2024.

NO	PEKERJAAN	SR
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Batu Raya II	22
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Benangin I	22
3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Karamuan	22
4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Lahei II	22
5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di Kelurahan Lanjas	24
6	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Lemo II	22
7	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Sikui	24

8	Pembangunan MCK Balai Basarah	1
9	Pembangunan MCK Gereja Imanuel Jl. Pendreh	2
10	Pembangunan MCK Pondok Pesantren Ar-Rahmaniah Kec. Lahei	1
11	Pembuatan WC Jl. Muara Teweh – Puruk Cahu RT. 09 KM. 03 Desa Nihan	1

Faktor Penghambat :

- Belum semua masyarakat Kabupaten Barito Utara menyadari pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi.
- Pengembangan jaringan air limbah terpusat belum optimal disebabkan faktor keterbatasan pendanaan dan topografi wilayah.

Faktor Pendorong :

- Salah satu target pembangunan berkelanjutan adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- Kebutuhan akses pelayanan sanitasi semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barito Utara.
- Serta tingkat kesadaran mayarakat akan kebutuhan akses sanitasi yang layak dan aman.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 4

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 5 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang				
Indikator Kinerja	**Target 2024**	**Realisasi 2024**	**Capaian (%) 2024**	**Realisasi 2023**
1. Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	100	100 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kelima yaitu “Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW

Rumus/perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah permohonan rekom yang disetujui}}{\text{Jumlah permohonan yang diajukan}} \text{ X 100 \%}$$

$$\frac{\text{27 Dokumen}}{\text{27 Dokumen}} \text{ X 100 \%} = \text{100 \%}$$

Target 100 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 sebesar **100 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program perencanaan tata ruang dengan kegiatan penyusunan rencana teknis ruang kawasan. Dari Hasil koordinasi dengan bidang terkait, indikator ini mengalami perubahan rumusan perhitungan yang sebelumnya dari rasio luasan dengan satuan Ha menjadi dokumen informasi telaah kesesuaian tata ruang. Dikarenakan untuk data menetepkan HPL/HGB bukan kewenangan dari Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melainkan kewenangan dari ATR/BPN Kantah Kabupaten Barito Utara. Rumusan perhitungan dokumen ditampilkan dari bentuk persentase yang telah dituangkan ke dalam RENSTRA Perubahan Tahun 2024-2026.

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Adanya PERDA Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brito Utara Tahun 2019 – 2039, Tersedianya dana dan SDM.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2024

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas

A.2. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2023

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(6)	(7)	(7)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	– Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik (>40 km/jam) – Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	43,30 % 85,09 %	81,49 89,85	58,25 % 102,60 %	100,43 106,07
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi	– Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	63,05 %	95,10	68,04 %	95,43
3.	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	– Persentase rumah tangga berakses air bersih	55,07 %	96,75	56,95 %	84,32
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	– Persentase drainase dalam kondisi baik – Persentase rumah tinggal bersanitasi	112,89 % 52,81 %	144,87 70,41	97,50 % 75,80 %	120,07 93,17
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	– Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	100 %	100	100 %	100
CAPAIAN RATA-RATA				**99,15**		**97,10**

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2024-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Dapat dilihat dari tabel 3.7 di atas capaian kinerja tahun 2023 rata rata sebesar 99,15 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja rata rata tahun 2024 sebesar 97,10 % terjadi penurunan capaian kinerja sekitar 2,05 %.

A.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target pada Renstra 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Renstra Tahun 2024	
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	– Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam) – Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	58,25 % 102,60 %	100,43 106,07	58,00 % 96,73 %	100,43 106,07
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	– Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	68,04 %	95,43	71,30 %	95,43
3.	Meningkatnya rumah tangga berakses air bersih	– Persentase rumh tangga berakses air bersih	56,95 %	84,32	67,54 %	84,32
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	– Persentase drainase dalam kondisi baik – Persentase rumah tinggal bersanitasi	97,50 % 75,80 %	120,07 93,37	81,20 % 78,09 %	120,07 93,37
5.	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	– Ketataatan Terhadap RTRW	100 %	100	100 %	100
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA			**97,10 %**		**97,10 %**	

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Perubahan Dinas PUPR Tahun 2024-2026, maka secara umum belum ada indikator yang telah mencapai target jangka menengah. Meskipun terdapat indikator yang pencapaiannya sudah 100%, namun belum dapat dikatakan telah mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator tersebut setiap tahunnya target realisasinya memang sudah 100 %. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai 100% pada tahun terakhir periode Renstra Dinas PUPR.

A.4 PERBANDINGAN PENCAPIAN KINERJA DENGAN ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini diasajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efesiensi (6-9)
			Taget	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	– Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	58,00 %	58,25 %	100,43	133.167.127.602	77.231.139.977	58.00	- 91,3
		– Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	96,73	102,60 %	106,07	238.484.808.478	104.769.047.160	43.93	+ 34,17
	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, dan irigasi	– Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	71,30%	68,04%	95,43%	1.500.000.000	1.477.478.500	98.52	- 3,09
	Meningkatnya rumah tangga berakses air bersih	– Persentase rumah tangga berakses air bersih	67,54%	56,95%	84,32%	2.889.190.000	2.787.430.786	96.48	- 12,16
	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	– Persentase drainase dalam kondisi baik	81,20 %	97,50 %	120,07	1.000.000.000	609.117.500	60,91	+ 59,16
		– Persentase rumah tinggal bersanitasi	81,18 %	75,80 %	93,37	1.423.854.500	1.411.531.500	99,13	- 5,76
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	– Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	100	1.800.000.000	779.633.000	43.31	+ 56,69

A.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA DAN SOLUSI YANG DIBERIKAN.

Secara Umum pencapaian kinerja rata-rata untuk semua sasaran pada tahun 2024 ini belum tercapai 100%, meskipun terdapat beberapa sasaran yang mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori baik. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain :

a. Faktor penyebab tercapainya target antara lain:
    1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.
    2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
    3. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
    4. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
    5. Pengawasan yang semakin intensif baik dari internal dan eksternal (Tim internal Dinas, APIP, kalangan insan pers/LSM dan TP4D Kejaksaan Negeri)

b. Faktor penyebab tidak tercapainya target antara lain:
    1. Berkaitan dengan tupoksi pihak ekternal (sosial, politis, teknis dan wilayah)
    2. Masih sulitnya mengimplementasikan pengangaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Dinas PUPR.
    3. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di PD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
    4. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

c. Adapun Solusi yang diberikan atas penurunan kinerja yaitu :

1. Penambahan anggaran pada program-program yang mendukung kinerja utama.
2. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
3. Lebih difokuskan kegiatan-kegiatan atau pun paket pekerjaan fisik yang mendukung nilai capaian kinerja.
4. Melakukan koordinasi dengan bidang terkait dan sinkronisasi data antara perencanaan dan pelaksana kegiatan.
5. Akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

A.6. ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis kemungkinan terjadinya efesiensi atas penggunaan sumber daya disebabkan antara lain karena beberapa faktor yaitu:

1) Pengadaan barang / jasa yang nilainya besar sehingga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dilaksanakan melalui sistem pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung melalui Lelang oleh ULP.
2) Sikap konsisten / konsekuen terhadap peraturan yang berlaku, terutama dalam pembayaran atas hasil pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa yang sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Tim P2HP dan rekomendasi BPK R.I. maupun BPKP.
3) Tersusunnya ketetapan harga satuan bahan dan upah dalam kontrak penawaran oleh pihak penyedia barang/jasa melalui Keputusan Bupati yang realistis, faktual dan aplikatif sehingga tidak memberatkan pihak penyedia barang/ jasa untuk bekerja dengan kualitas yang baik dan tepat waktu.

A.7. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Program-program tersebut dilaksanakan oleh sekretariat dan masing masing yaitu Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta karya, Bidang Tata Ruang, Bidang Jasa Konstruksi, UPT Balai Alkal. Dalam Usaha Penyelesaian Pekerjaan tersebut Kami mengalami berbagai kendala dalam Pelaksanaannya antara lain ;

Hal tersebut dapat diselesaikan dengan solusi sebagai berikut :

a) Proses penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilaksanakan sebelum masuk tahun anggaran berkenaan, sehingga proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan/lelang dapat dilaksanakan sejak awal tahun anggaran dan paling lambat Bulan Maret sudah selesai dengan memprioritaskan pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya sampai dengan sembilan bulan.
b) Jumlah Personil Pokja Pengadaan perlu disesuaikan dengan rata-rata jumlah paket pengadaan/lelang yang akan dievaluasi dan menyampaikan jadwal reviu paket lelang ke KPA.
c) Untuk pekerjaan yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai akan diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya/ luncuran anggaran, sedangkan untuk lanjutan pekerjaan fisik lapangan akan diberlakukan pemberian kesempatan (50 Hari) sesuai peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2024.

Sebagai salah satu instrumen pengukur dari tercapainya perjanjian kinerja ini dapat dikaitkan dengan Meningkatnya nilai SAKIP Kabupaten Barito Utara menjadi B, dimana Dinas Pekrjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mendukung indikator kinerja tersebut.

B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 berasal dari APBD Daerah Kabupaten Barito Utara. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki belanja daerah yang mana terbagi menjadi dua yaitu belanja operasi dan belanja modal.

Untuk belanja operasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.644.065.181,- dengan realiasi Rp. 86.912.343.340,- atau 77,85 % yang mana dengan rincian belanja pegawai dan belanja barang jasa. Sedangkan untuk belanja modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 738.690.221.191,- dengan realisasi Rp. 418.800.205.013,- atau 56,69 % dengan rincian belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

Adapun realisasi rincian anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada **tabel 3.10 Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2024** dibawah ini :

Tabel 3.10. Realisasi Keuangan Tahun 2024

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	192.656.250	190.443.969	2.212.281	98,85
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.625	4.629.000	370.625	92,59
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.027.750	4.710.000	317.750	93,68
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.999.625	4.191.375	808.250	83,83
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.999.625	4.081.000	918.875	81,62
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.010.000	72.027.100	17.982.900	80,02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.583.613.295	9.476.952.887	3.106.660.408	75,31
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.122.280.000	2.351.950.000	770.330.000	75,33
	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.402.080.000	1.274.910.000	127.710.000	90,93
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.000.000	11.652.000	348.000	97,10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.990.625	4.853.000	1.137.625	81,01
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.113.875	1.201.000	1.912.875	38,57
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	187.500.000	187.500.000	0	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21.873.500	19.086.000	2.787.500	87,26
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500.730.000	394.436.436	106.293.564	78,77
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.825.000	21.789.250	35.750	99,84
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.573.735.600	2.198.450.000	375.285.600	85,42
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.997.250	84.149.930	847.320	99,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.018.000	97.769.900	1.453.100	97,75
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	116.920.000	101.150.000	15.770.000	86,51
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.300.000.000	1.236.808.892	63.191.1080	95,14
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
	Pengadaan Mebel	195.837.500	194.050.000	1.787.500	99,09
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.600.000	3.000.000	9.600.000	23,81
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.429.407.840	1.291.358.570	3.138.049.270	29,15
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.150.000	42.850.000	21.300.000	66,80
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	23.564.200	6.435.800	78,55
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.946.200	213.995.465	95.950.735	83,70
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.937.497.000	1.508.511.416	428.985.584	77,86
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.700.000.000	1.669.344.000	30.656.000	98,20
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	1.030.880.000	548.918.800	481.961.200	53,25
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	6.082.471.146	5.811.649.234	270.821.912	92,68
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	27.812.704.000	23.166.540.211	4.646.163.789	83,29
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	-	-	-	-
	Normalisasi/Restorasi Sungai	3.626.000.000	3.479.242.650	130.380.500	95,95
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	4.446.327.625	3.905.743.945	540.583.680	87,84
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.500.000.000	1.477.748.500	22.251.500	98,52
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.950.985.700	1.630.493.836	1.320.491.864	55,25
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10.685.575.000	10.570.653.850	46.504.000	98,92
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	2.889.190.000	2.787.430.786	101.759.214	96,48
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	7.538.207.000	7.181.969.855	356.237.145	95,27
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.650.000.000	1.644.740.000	5.260.000	99,68
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.423.854.500	1.411.531.000	5.489.500	99,13
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala				
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	-	-	-	-
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	888.000.000	619.059.000	268.941.000	69,71
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
	Pembangunan Jalan	134.492.894.698	77.231.139.977	57.261.754.721	57,42
	Rehabilitasi Jalan	50.269.991.100	48.705.463.450	1.564.527.650	96,89
	Pembangunan Jembatan	330.358.899.519	104.769.047.160	225.589.852.358	31,71
	Rehabilitasi Jembatan	5.956.481.100	5.100.260.850	856.220.250	85,63
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI				
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	512.499.900	334.875.500	164.249.400	65,34
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	561.500.000	529.231.089	31.883.511	94,25
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				
	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	1.800.000.000	779.633.000	1.020.367.000	43,31
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.328.000.000	1.191.707.814	136.292.186	89,74
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.107.864.500	509.256.284	598.608.216	45,97
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	36.721.350.800	34.723.010.376	2.448.340.424	93,33
	JUMLAH	**623.115.692.462**	**508.309.119.916**	**114.512.319.456**	**81,58**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, yang pelaksanaan kegiatannya pada tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah Dinas Pekerjaan dan Umum Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun capaian yang belum optimal dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.

Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 telah dicapai dengan baik. Hal ini terlihat dari 7 indikator kinerja yang telah diperjanjikan, 2 indikator kinerja sesuai target bahkan ada yang melebihi target, sedangkan 5 indikator kinerja masih belum mencapai target, namun walaupun ada indikator yang belum mencapai target, dengan beberapa catatan terkait ketidaktercapaian indikator dimaksud telah dipaparkan pada penjelasan di bab sebelumnya, akan tetapi secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 99,15 %, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 87,35 % dan 99,58 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 95,10 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 96,75 %
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 144,87 % dan 70,41 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 100 %

Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang semakin kondusif.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartispasi aktif untuk membangun Muara Teweh kota Barito.

Semoga apa yang telah kita laksanakan ini selalu mendapat ridho Allah SWT. Amin.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Peresentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	Mengukur tingkat kemantapan jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten kondisi baik / Panjang jalan seluruh kabupaten x 100% Indikator ini menghitung capaian sasaran panjang jalan yang tertangani dan dalam kondisi baik	Bidang Bina Marga	DPUPR
2.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Peresentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	Mengukur tingkat kelayakan jembatan dalam kondisi baik	Panjang jembatan kondisi baik / Panjang jembatan seluruhnya x 100% Indikator ini menghitung capaian sasaran panjang jembatan yang tertangani dan dalam kondisi baik	Bidang Bina Marga	DPUPR
3.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air dan Irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Daerah irigasi dalam kondisi baik didefinisikan sebagai daerah irigasi yang fungsional dengan sistem irigasi yang baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik / Luas irigasi kabupaten x 100% Indikator ini menghitung capaian sasaran luas irigasi yang tertangani dan dalam kondisi baik	Bidang Sumber Daya Air	DPUPR
4.	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air bersih melalui SPAM jaringan perpipaan dan	Penduduk berakses air bersih / Jumlah penduduk x 100% Indikator ini menghitung capaian sasaran penduduk yang terlayani air bersih melalui sambungan rumah	Bidang Cipta Karya	DPUPR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota			
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	Jumlah saluran drainase dalam kondisi baik yang dinyatakan dalam persen	Panjang Drainase dalam kondisi baik/tidak tersumbat / Panjang drainase di daerah kabupaten x 100% Indikator ini menghitung capaian sasaran panjang drainase yang terbangun.	Bidang Cipta Karya	DPUPR
6.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL di lubang tanah jika wilayah tempat tinggal di perdesaan.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi / Jumlah rumah tinggal x 100% Indikator ini menghitung capaian sasaran rumah tinggal yang berakses sanitasi melalui sambungan rumah	Bidang Cipta Karya	DPUPR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
7.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Peresentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	Mengukur tingkat ketaatan penataan dan pengelolaan ruang	Jumlah permohonan rekom yang disetujui / Jumlah permohonan masuk x 100% Indikator ini menghitung capaian/jumlah rekomendasi terhadap telaahan kesesuaian pemanfaatan ruang	Bidang Tata Ruang	DPUPR

a.n. Pj. Bupati Barito Utara
Kepala Dinas,

M. Iman Topik, SIP., M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700923 199101 1 001

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1.	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah	- Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	5,80%	11,60%	17,40%	23,20%	Program Penyelengaraan Jalan	Capaian Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Sarana Infrastruktur Jalan untuk membuka keterisoliran wilayah	Panjang Jalan yang dibangun	Rp 133.167.127.602	KABID BINA MARGA
		- Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	9,67%	19,35%	29,02%	38,69%	Program Penyelengaraan Jalan	Capaian Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Sarana Infrastruktur Jembatan untuk membuka keterisoliran wilayah	Jumlah Jembatan yang dibangun	Rp 238.484.808.478	KABID BINA MARGA
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi	- Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	7,13%	14,26%	21,39%	28,52%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi dan irigasi dalam kondisi baik	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	Panjang jaringan irigasi yang berfungsi	Rp 1.500.000.000	KABID SUMBER DAYA AIR
3.	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	- Persentase rumah tangga berakses air bersih	6,75%	13,51%	20,26%	27,02%	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Sarana dan Prasarana Air Minum Terbangun	Meningkatnya jumlahsambungan rumah yang mendapatkan akses air minum yang aman	Sarana dan Prasarana Air Minum Terbangun	Rp 2.889.190.000	KABID CIPTA KARYA
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	- Persentase drainase dalam kondisi baik	8,12%	16,24%	24,36%		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	Cakupan Layanan air limbah	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah drainase yang dibangun	Rp 10.736.500.000	KABID CIPTA KARYA
		- Persentase rumah tinggal bersanitasi	7,81%	15,62%	23,43%	31,24%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	Cakupan Layanan air limbah	Penyediaan Pembangunan Sanitasi Perkotaan	Jumlah KK yang terlayani SPALD	Rp 10.736.500.000	KABID CIPTA KARYA
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	- Persentase kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen Kawasan Peruntukan	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Jenis Dokumen Kawasan Peruntukan	Rp 1.800.000.000	KABID TATA RUANG

Muara Teweh, Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO UTARA

MUHAMMAD IMAN TOPIK, SIP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700923 199101 1 001